

SINERGITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GOMBANG KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI

Farida Novianti^{1)*}, Budi Puspo Priyadi²⁾

**¹Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
Semarang, Jawa Tengah
faridanovi9@gmail.com**

**²Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
Semarang, Jawa Tengah
budipuspo@gmail.com**

ABSTRAK

Kabupaten Boyolali menjadi salah satu daerah yang hingga kini masih dihadapkan dengan permasalahan sampah. Desa Gombang menjadi salah satu desa di Kabupaten Boyolali yang melakukan pengelolaan sampahnya sendiri dan masih menghadapi persoalan dalam pengelolaannya, yakni Tempat Pembuangan Sementara Desa Gombang diprediksi akan tidak mampu menampung sampah yang setiap hari ditimbulkan oleh masyarakat Desa Gombang sendiri, ditambah dengan pembuangan sampah liar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas pemerintah dan masyarakat serta faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Desa Gombang, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Gombang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Komunikasi dan koordinasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, yakni masih terdapat tantangan, terutama dalam kesadaran masyarakat dan masyarakat belum memberikan *feedback* yang baik atas himbauan terkait pembuangan sampah di TPS. Beberapa masyarakat telah menunjukkan partisipasi aktif melalui program bank sampah, tetapi masih terdapat yang belum melakukan pemilahan sampah dan membuang sampah sembarangan. Faktor penghambat utama adalah adanya dominasi peran pemerintah desa, yang mengurangi partisipasi masyarakat lainnya sehingga perlu upaya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta menciptakan kesetaraan peran.

Kata kunci: sinergitas, pemerintah, masyarakat, koordinasi, komunikasi.

ABSTRACT

Boyolali Regency is one of the areas that is still faced with waste problems. Gombang Village is a village in Boyolali Regency that manages its own waste and still faces problems in its management, namely that the Gombang Village TPS will not be able to accommodate the waste generated every day by the Gombang Village community itself, coupled with illegal waste disposal. This study aims to describe and analyze the synergy between the government and the community and the inhibiting factors in waste management in Gombang Village, Boyolali Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study show that the synergy between the village government and the community in waste management in Gombang Village has not been fully implemented. Communication and coordination have not been fully implemented, namely there are still challenges, especially in public awareness and communication intensity. Several residents have shown active

participation through the waste bank program, but many still litter. The main inhibiting factors are the low public awareness and the dominant role of the village government, which reduces the participation of other residents so that efforts are needed to increase public awareness and involvement and create equal roles.

Keywords: synergy, government, community, coordination, communication.

PENDAHULUAN

Sampah hingga kini masih menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia mengingat jumlah timbulan sampah di Indonesia yang semakin banyak. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2024, per 24 Juli 2024 hasil input dari 290 kab/kota se Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 35,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak terkelola.



Gambar 1. Jumlah Timbulan Sampah

Sumber: KLHK

Berdasarkan gambar 1 tersebut dapat diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir total timbunan sampah di Indonesia mengalami peningkatan terus menerus, yakni pada tahun 2020 sebanyak 27,5 juta ton, dan kemudian naik pada tahun 2021 menjadi 28,5 juta ton. Kemudian pada 2022 naik menjadi 38,63 juta yang kemudian naik lagi menjadi 38,64 juta ton per tahun pada 2023. Peningkatan timbunan sampah tersebut tidak terlepas dari jumlah penduduk Indonesia yang besar dan terus mengalami peningkatan, ditambah dengan tempat pembuangan ataupun pengelolaan sampah yang terbatas jumlahnya dan minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berikut tabel 1 provinsi penghasil timbunan sampah terbesar di Indonesia pada tahun 2023.

Tabel 1. Provinsi Penghasil Sampah Terbesar di Indonesia 2023

No	Provinsi	Jumlah timbulan sampah
1	Jawa Timur	6.117.220
2	Jawa Tengah	5.372.159
3	Jawa Barat	4.782.722
4	DKI Jakarta	3.141.650
5	Banten	2.037.973

Sumber: SIPSN, 2024

Berdasarkan tabel tersebut yang dihimpun dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dapat terlihat bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil sampah terbanyak di Indonesia Pada tahun 2023 dengan jumlah timbunan sampah sebesar 5,73 juta ton per tahun. Provinsi Jawa Tengah memegang posisi kedua setelah Provinsi Jawa Timur yang menduduki posisi pertama, yang kemudian diikuti posisi ketiga hingga posisi kelima berturut-turut diisi oleh Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Padahal jika dilihat dari jumlah penduduknya Jawa Barat menjadi provinsi dengan total penduduk terbanyak di Indonesia pada tahun 2023, yakni 49,9 juta jiwa (17,78%) dari total penduduk pada Desember 2023. Kemudian, Jawa Timur 41,64 juta jiwa (14,83%) dan Jawa Tengah 38,13 juta jiwa (13,58%). Namun, justru Jawa Tengah menduduki peringkat kedua sebagai provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia dan Jawa Barat menduduki peringkat ketiga. Hal tersebut menandakan bahwa Jawa Tengah meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat, ternyata menghasilkan timbunan sampah yang lebih banyak dan menduduki peringkat kedua sebagai provinsi penghasil sampah terbanyak di Indonesia

Kabupaten Boyolali menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang hingga kini masih dihadapkan dengan permasalahan sampah. Kabupaten Boyolali masih mengalami kenaikan timbunan sampah sepanjang 4 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2020 sebesar 105,094.61 ton, kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 106,159.34 ton. Kemudian pada 2022 naik menjadi 106,781.29 ton dan yang terakhir pada 2023 menjadi 108,373.66 ton/tahun. Peningkatan timbunan sampah tersebut tidak terlepas dari peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah, serta telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Selain karena peningkatan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan timbunan sampah tersebut juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya perumahan dan industri di Kabupaten Boyolali. Dikutip dari (*Pemerintah Kabupaten Boyolali*, n.d.), produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Boyolali terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya perumahan dan industri yang membuka investasi di Kabupaten tersebut.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, produksi sampah di Kabupaten Boyolali saat ini diperkirakan mencapai sekitar 300 ton per hari. Dari jumlah tersebut yang masuk ke TPA sampah hanya sepertiganya atau sekitar 100 ton per hari. Dari 100 ton itu, yang 35-40 ton berasal dari layanan mandiri masyarakat yang bermitra dengan DLH. Kepala DLH Boyolali menyatakan bahwa saat ini sampah yang ditangani pihaknya sebanyak 58 persen, di mana 42 persennya belum terkelola dan teridentifikasi yang mana sampah yang belum tertangani tersebut diketahui karena terkadang berada di sungai-sungai (detikJateng, 2024).

Gombang merupakan salah satu dari 261 desa yang terletak di Kabupaten Boyolali. Desa Gombang memiliki luas wilayah sebesar 127,90 Ha. Desa Gombang menjadi salah satu Desa di Kabupaten Boyolali yang masih menghadapi persoalan sampah. Pada beberapa tahun terakhir timbunan sampah di Desa Gombang mengalami kenaikan, yakni terakhir pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 48,4 ton yang mana pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 47,6 ton.

Kenaikan jumlah timbulan sampah tersebut dilatar belakangi oleh jumlah penduduk di Desa Gombang yang mengalami kenaikan tiap tahunnya, banyaknya wisatawan yang datang ke Desa Gombang dan adanya event-event yang sering diselenggarakan di Desa Gombang. Persoalan tersebut juga di latar belakangi oleh TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Winong Boyolali yang sudah *over capacity* sehingga masing-masing daerah harus mengelola sampahnya sendiri. Hal tersebut juga sesuai dengan yang tertuang pada pasal 52 Perda Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan Pengelolaan Sampah di wilayah Desa.

TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Desa Gombang yang mempunyai luas area \pm panjang 30 m dan lebar 20 m dan kecuraman tebing sedalam \pm 10 m akan tidak mampu menampung sampah yang setiap hari ditimbulkan oleh masyarakat Desa Gombang, ditambah dengan pembuangan sampah liar yang dilakukan oleh masyarakat di luar Desa Gombang. Selain itu, pengelolaan sampah ini juga menjadi perhatian pemerintah Desa karena kaitannya dengan Desa Gombang yang akan menjadi Desa Wisata ke depannya sehingga persoalan sampah tidak mengganggu estetika Desa Gombang. Sebenarnya pemerintah desa juga telah bekerja sama dengan penarik gerobak sampah yang ada di setiap Kadus sehingga pengelolaan sampah lebih terstruktur, namun masih terdapat pihak yang tidak bekerja sama sehingga masyarakat membuang sampahnya secara langsung ke TPS tanpa memilahnya. Pada saat in dapat dilihat bahwa kondisi TPS Desa Gombang sudah hampir penuh, hingga bahkan terkadang sampah melebar ke jalan dan lahan sawah masyarakat seperti yang terlihat pada Gambar 1.2. Timbunan sampah di TPS Desa Gombang. Selain itu, pengelolaan sampah di TPS Desa Gombang dilakukan dengan pembakaran sehingga masih meninggalkan residu dan menyebabkan polusi udara.



Strasi
an

Gambar 2. Timbunan Sampah TPS Desa Gombang

Keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan sinergitas *stakeholders* demi tercapainya pengelolaan sampah yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pasal 10 Perda Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah. Pemerintah Desa Gombang selaku pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan sampah di wilayahnya bersinergi dengan masyarakat dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah di Desa Gombang. Akan tetapi, kurangnya upaya pemisahan sampah organik dan anorganik dari masyarakat Desa Gombang masih menjadi persoalan karena dapat menyebabkan volume sampah di TPS semakin meningkat. Apabila hanya Pemerintah Desa yang bekerja, namun kesadaran masyarakat masih kurang maka hasil yang dicapai nantinya akan kurang maksimal. Dalam masyarakat dengan sinergi tinggi, yang dapat dilihat sebagai permainan *non-zero-sum*, hubungan antara individu bersifat simbiosis. Di sisi lain, dalam masyarakat dengan sinergi rendah, seperti permainan *zero-sum*, hubungan bersifat parasite (Dale, 1981).

Wang et al. (2022) menyatakan bahwa interaksi koordinasi oleh berbagai pemangku kepentingan mendorong keadaan sinergis sistem pengelolaan sampah terpadu. Sinergitas di antara para pemangku kepentingan menjadi satu hal yang penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Najiyati & Susilo (2011) mengartikan sinergitas *stakeholder* sebagai suatu kombinasi unsur-unsur, serta bagian yang dapat menghasilkan *output* atau keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Sinergitas bisa dibangun dengan dua cara, yakni dengan komunikasi dan koordinasi. Sinergi dapat didefinisikan sebagai "interaksi atau kerja sama dua atau lebih organisasi, zat, atau agen lain untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada jumlah efek masing-masing" (Geller & Geller, 2020).

Penelitian tentang sinergitas ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, salah satunya, yakni penelitian Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Sampah di Pasar Pinasungkulon Karombasan Kota Manado yang dilakukan oleh Roring et al. (2023). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah di Pasar Pinasungkulon belum sepenuhnya terjadi dilihat dari aspek pemecahan masalah, peran pemerintah dan dalam penggunaan jaringan komunikasi.

Dalam mengatasi permasalahan sampah di Desa Gombang tersebut, tentunya keterlibatan dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini serta mengetahui faktor penghambat sinergitas antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Fokus penelitian ini, yaitu sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam hal ini meliputi a) sinergitas dapat terbangun melalui dua cara, yaitu komunikasi, indikatornya ialah *numerical, channel, goal, feedback, and relationship type*; serta koordinasi, indikatornya adalah kesepakatan dan komitmen, kompetensi, kesadaran, dan kontiunitas b) hambatan sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sinergitas pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali

Najiyati & Susilo (2011) mengartikan bahwa sinergi adalah kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara, yaitu komunikasi dan koordinasi.

1) Komunikasi

Dalam menghasilkan hubungan yang sinergi maka harus menciptakan komunikasi dan komunikasi yang baik karena pada dasarnya sinergitas akan terjadi apabila terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara keduanya (Rahmawati, dkk: 2015). Komunikasi yang efektif memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain (Prihartono et al., 2025). Komunikasi ialah cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan kemudian si penerima pesan memberikan timbal balik atas informasi yang disampaikan.

Menurut (Littlejohn, 2005) komunikasi memiliki beberapa kriteria, sebagai berikut:

a. *Numerical*

Komunikasi yang dilaksanakan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Gombang telah memenuhi kriteria *numerical* ini, yakni menurut Littlejohn (2005) jumlah umum kriteria komunikasi biasanya terdiri dari dua orang atau lebih, tergantung pada situasi dan topik yang dibicarakan. Dalam hal ini terbukti dengan adanya komunikasi antara pemerintah Desa Gombang dengan masyarakat desa Gombang di dalam pengelolaan sampah di Desa Gombang. Pemerintah Desa Gombang berkomunikasi dengan masyarakat desa Gombang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah melalui ketua RT. Dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan sampah biasanya pemerintah desa gombang mengundang para ketua RT untuk diberikan sosialisasi maupun pengarahan terkait pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah desa gombang juga berkomunikasi dengan masyarakat melalui ketua PKK yang kemudian informasi terkait pengelolaan sampah akan disampaikan kepada masyarakat dalam pertemuan PKK. Pihak pemerintah desa Gombang secara aktif berkomunikasi dengan Ketua RT 08 dan 06 sebagai RT yang telah menerapkan bank sampah di Desa Gombang hingga kini. Pengelola bank sampah juga aktif berkomunikasi dengan pengepul dalam hal penjualan sampah anorganik yang masih laku dijual. Pemerintah desa Gombang juga berkomunikasi langsung dengan pengelola sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) dalam hal penanganan sampah di TPS Gombang.

b. *Channel*

Pemerintah desa Gombang menggunakan berbagai saluran untuk berkomunikasi dengan masyarakat, baik secara langsung melalui pertemuan lisan maupun dengan komunikasi tertulis. Pemerintah desa gombang berkomunikasi langsung melalui pertemuan dengan masyarakat, yaitu melalui pertemuan PKK desa Gombang dan pertemuan dengan ketua RT. Di sisi lain, pemerintah desa juga memanfaatkan aplikasi *WhatsApp* untuk berkomunikasi dengan pengelola sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Dalam pengelolaan bank sampah, masyarakat pengelola bank sampah dengan anggota bank sampah melakukan komunikasi melalui grup *WhatsApp* dan tatap muka sehingga menciptakan jalinan informasi yang lebih baik. Komunikasi secara tatap muka dilakukan ketika penimbangan sampah yang sudah dikumpulkan pada setiap bulan. Selain itu, ketua bank sampah juga berkomunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan PKK dalam hal pengelolaan bank sampah serta ajakan agar seluruh masyarakat turut serta dalam program bank sampah.

c. *Goal*

Komunikasi antara pemerintah desa Gombang dengan masyarakat sudah memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan nyaman. Hal tersebut juga mengingat tujuan desa Gombang nantinya akan menjadi Desa Wisata sehingga persoalan sampah ini harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu estetika Desa Gombang. Lingkungan yang bersih dan rapi adalah daya tarik utama bagi wisatawan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menurunkan kualitas estetika desa, bahkan mengurangi minat wisatawan untuk datang. Wisatawan cenderung mencari tempat yang tidak hanya indah secara alami, tetapi juga terjaga kebersihannya. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa Gombang untuk memastikan bahwa komunikasi dengan masyarakat berjalan dengan efektif, agar mereka turut berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah dan memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Komunikasi yang jelas dan efektif antara Pemerintah Desa Gombang dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang menjadikan desa ini sebagai Desa Wisata yang ramah lingkungan, bersih, dan sehat. Pengelolaan sampah yang baik akan mendukung terciptanya lingkungan yang nyaman dan estetis, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik wisata dan kualitas hidup masyarakat setempat.

d. Feedback

Feedback ialah sebuah informasi yang didapatkan dari pihak yang berkomunikasi, mengenai apa yang telah dilakukan, hasil yang dikeluarkan, dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Gombang, komunikasi yang terjadi antara pihak Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Gombang sudah terdapat umpan balik di antara kedua pihak sehingga memenuhi kriteria ini. Komunikasi antara pihak Pemerintah Desa dengan ketua RT masing-masing sudah terjalin secara dua arah dalam hal pengelolaan sampah di Desa Gombang. Kedua pihak saling memberi tanggapan agar pengelolaan sampah di Desa Gombang semakin baik. Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat juga sudah terjalin dua arah, meskipun hingga kini masih terdapat masyarakat yang belum mengikuti himbauan pemerintah desa, yaitu masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di sisi barat TPS sehingga sampah berserakan ke pinggir jalan dan menganggu pengguna jalan. Dalam menyampaikan keluhan terkait pengelolaan sampah biasanya masyarakat melalui ketua RT untuk disampaikan ke pihak pemerintah desa ataupun terkadang langsung kepada pihak pemerintah desa dan pemerintah desa berusaha untuk selalu memberikan feedback yang baik atas keluhan yang disampaikan masyarakat. Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat pengelola bank sampah juga terjalin dua arah dan saling memberi saran demi terciptanya pengelolaan sampah di Desa Gombang yang lebih baik. Apabila terdapat persoalan dalam mengelola bank sampah, masyarakat pengelola bank sampah akan mendiskusikannya dengan pemerintah desa untuk mendapatkan saran.

e. Relationship type

Relationship type menurut Littlejohn (2005) merupakan hubungan yang terjalin di antara komunikator dan komunikan, pada saat berkomunikasi maupun setelah berkomunikasi. Tipe hubungan komunikasi antara Pemerintah Desa Gombang dengan masyarakat Desa Gombang sudah terjalin secara interpersonal dan dengan hubungan yang professional. Hal tersebut dibuktikan dengan tujuan komunikasi antara pemerintah desa Gombang dengan masyarakat yang berfokus pada hal-hal yang memiliki kaitan dengan pengelolaan sampah di Desa Gombang. Pertemuan yang dilakukan antara pemerintah desa dengan ketua RT dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah berfokus pada pengelolaan sampah, baik berkaitan dengan pengangkutan sampah ke TPS maupun pengolahan sampah yang kemudian pihak ketua RT meneruskannya kepada masyarakat RT setempat. komunikasi yang dilakukan antara pemerintah desa dengan masyarakat pengelola bank sampah berfokus pada pengelolaan bank sampah dan pengolahan sampah.

2) Koordinasi

Di samping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan (2005) bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi. Koordinasi ialah intregasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama, yaitu bekerja ke arah tujuan bersama (Silalahi, 2011). Tujuan koordinasi ialah untuk melakukan gerak pekerjaan agar seirama dan serasi serta menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang disepakati antar unit kerja untuk mencapai kepentingan secara bersama (Harits, 2020). Menurut Handayaningrat (1989) koordinasi dapat dikaji menggunakan kriteria sebagai berikut:

a. Kesepakatan dan komitmen

Kesepakatan dalam koordinasi menurut Handayaningrat (1989) menandakan adanya kesesuaian kehendak, antar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pemerintah desa dengan masyarakat pengelola bank sampah memiliki kesepakatan dalam pengelolaan bank sampah yang tertuang dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan saat pembentukan bank sampah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.

Masyarakat pengelola bank sampah memiliki tugas merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kegiatan bank sampah. Pengelola bank sampah memiliki kesepakatan dengan pengelola dalam hal pengumpulan dan pemilahan serta penjualan dari bank sampah secara berkala yang tertuang dalam MOU. Hal tersebut bertujuan mendidik masyarakat untuk memecah permasalahan sampah, membiasakan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan serta mengurangi jumlah barang bekas yang terbuang percuma.

Pemerintah Desa dan masyarakat sudah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penyedia dalam pengelolaan sampah, dan masyarakat sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan arahan dan himbauan dari pemerintah desa. Masyarakat memiliki tanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan sendiri. Namun, komitmen dari beberapa masyarakat masih rendah karena dari masyarakat masih terdapat pihak yang belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu masih membuang sampah dengan cara yang sembarangan dan tanpa memilahnya. Penelitian oleh Satibi et al. (2023) menemukan bahwa komitmen para pemangku kepentingan dinilai sangat penting dalam mengsinergikan kebijakan pengadaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah Desa Gombang menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan sampah dengan memberikan sarana prasarana berupa gerobak sampah untuk pengangkutan sampah ke TPS di tiap Dusun, dan memberikan tong sampah di setiap rumah masyarakat Desa Gombang. Masyarakat pengelola bank sampah menunjukkan komitmennya dengan melaksanakan pengelolaan bank sampah hingga kini sesuai dengan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan saat pembentukan bank sampah.

b. Kompetensi

Kompetensi dalam koordinasi menurut Handayaningrat (1989) berkaitan dengan bagaimana pengetahuan, kemampuan, sikap yang baik, hingga semangat kerja yang tinggi. Kompetensi pemerintah Desa Gombang sudah baik sebab sudah memiliki pengetahuan, kemampuan, sikap, dan semangat kerja yang baik di dalam proses pengkoordinasian pada pengelolaan sampah. Pihak pengelola sampah dari pemerintah Desa Gombang juga telah memiliki kompetensi dalam pengelolaan sampah karena sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan sampah dalam kurun waktu yang cukup lama. Pihak pengelola bank sampah dari RT 08 yang sekaligus merupakan ketua RT juga memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sampah mengingat latar belakang pendidikan dan pengalamannya yang cukup banyak di bidang lingkungan, yakni pernah menjabat di BLH (Badan Lingkungan Hidup). Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang belum memahami bahwa dalam membuang sampah ke TPS seharusnya di letakkan di sisi Timur yang dapat dilihat dari adanya sampah yang tergeletak di sisi Barat TPS hingga pinggir jalan sehingga mengganggu pengendara yang melintas. Selain itu, belum semua masyarakat memahami cara pemilahan sampah.

c. Kesadaran

Kesadaran dalam koordinasi menurut Handayaningrat (1989) berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab para stakeholder terhadap hasil koordinasi yang telah dilakukan. Kesadaran koordinasi oleh pemerintah desa Gombang dapat dilihat dengan adanya kerjasama dengan masyarakat dan pengelola TPS dalam menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah yang diataranya yaitu penyediaan tong sampah di setiap rumah masyarakat, penyediaan gerobak sampah untuk pengangkutan sampah ke TPS bagi setiap Dusun serta penyediaan TPS. Pihak pemerintah desa juga sudah menyediakan pengangkutan sampah menggunakan gerobak untuk setiap dusunnya, namun masih terdapat beberapa RT yang tidak turut serta. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang membuang sampah dengan cara melempar ke TPS secara asal sehingga sampah terkadang tergeletak di pinggir jalan begitu saja.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat pengelola bank sampah dapat dilihat dengan adanya kerjasama dengan pengepul dalam pengumpulan dan pemilahan serta penjualan dari bank sampah secara berkala sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ada di TPS. Pengelola bank sampah sering melakukan pengarahan kepada masyarakat pada setiap pertemuan PKK terkait pengelolaan sampah, himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan himbauan untuk turut serta dalam program bank sampah.

d. Kontiunitas

Kontinuitas dalam koordinasi menurut Handayaningrat (1989) berkaitan dengan apakah koordinasi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, seiring dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Keberlanjutan koordinasi antara pemerintah Desa Gombang dan masyarakat sejauh ini masih terus berlanjut dan berkesinambungan demi menciptakan lingkungan Desa Gombang yang bersih. Pihak pemerintah Desa Gombang juga sering turut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah yang aktif, yakni Bank Sampah RT.06 dan RT.08. Keberlanjutan koordinasi antara pengelola bank sampah dengan pengepul juga terus menerus mengingat terdapat kerjasama di antara mereka dalam jagat waktu lama dan tidak dibatasi pada tiap tahun seperti yang tertuang dalam MOU. Pemerintah Desa Gombang juga menuturkan bahwa pihaknya menerima bantuan untuk pembuatan TPS3R dari pemerintah pusat sehingga diharapkan pengelolaan sampah di Desa Gombang nantinya menjadi lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih. TPS3R yang merupakan singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, and Recycle, adalah tempat untuk mengelola sampah dengan konsep 3R. Konsep 3R sendiri terdiri dari tiga unsur, yaitu mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*). Dengan adanya TPS3R nantinya, pemerintah Desa Gombang berharap masyarakat Desa Gombang turut bisa bekerja sama dalam berkoordinasi di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS3R. Adanya TPS3R ini nantinya juga diharapkan dapat membantu menjamin kebutuhan lahan untuk penyediaan tempat pembuangan sampah di Desa Gombang.

B. Faktor Penghambat Sinergitas Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

a. Sumber daya manusia

Hingga saat ini, masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami dan menerapkan cara pengelolaan sampah yang baik. Meskipun telah diberi arahan, banyak masyarakat yang masih belum memisahkan sampah mereka sesuai kategori dan membuangnya dengan cara sembarangan di TPS. Kebiasaan membuang sampah secara asal menyebabkan sampah sering berserakan di jalan, bahkan dapat mencemari lahan sawah milik masyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pengelola sampah, yang harus bekerja ekstra untuk mengumpulkan dan membersihkan sampah yang tersebar, yang seharusnya bisa dihindari dengan sistem pengelolaan yang lebih baik. Pemerintah desa telah memberikan himbauan untuk membuang sampah pada TPS di sisi Timur guna mencegah penumpukan sampah di sisi Barat, namun masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikan instruksi tersebut dan membuang sampah di tempat yang tidak sesuai. Akibatnya, sampah menumpuk di sisi Barat, yang memperburuk kondisi kebersihan dan menciptakan masalah baru dalam pengelolaan sampah di desa. Kejadian ini mencerminkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, yang menambah kesulitan bagi pemerintah desa dan pengelola sampah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan dampak buruk dari sampah yang dibuang sembarangan menjadi penghambat dalam mewujudkan sinergitas yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Padahal, sebenarnya ada sejumlah masyarakat yang sudah memiliki kompetensi dan kesadaran dalam pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari masyarakat di RT 08 dan RT 06, yang telah secara konsisten mengimplementasikan program bank sampah dan melakukan pemilahan sampah dengan baik. Kesadaran masyarakat adalah kunci untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Desa Gombang.

b. Dominasi peran

Peran pemerintah desa cukup mendominasi dalam pengelolaan sampah ini, mengingat selain sebagai penyedia, pihak pemerintah desa juga mengelola sampah di TPS tanpa adanya pemilahan yang dilakukan dari masyarakat, meskipun dari beberapa RT sudah ada yang memilah sampahnya. Beberapa RT yang sudah menerapkan bank sampah juga mendominasi peran dalam pengelolaan sampah ini, sebab menyebabkan lemahnya peran masyarakat lain yang tidak turut serta dalam penerapan bank sampah ini di mana sebenarnya dari pemerintah desa juga sudah ada arahan terkait penerapan bank sampah sehingga memudahkan pengelolaan sampah sebelum dibawa ke TPS. Pengelola bank sampah yang merupakan masyarakat yang sukarela juga mendominasi di antara masyarakat lain yang tidak turut serta di mana untuk mencapai hubungan yang sinergis dibutuhkan kesetaraan tanpa adanya dominasi di antara semua pihak di dalam melaksanakan perannya.

SIMPULAN

Sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa Gombang belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena meskipun sudah terdapat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat, masih terdapat tantangan yang perlu di atasi. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang belum memberikan *feedback* yang baik atas himbauan yang diberikan oleh pemerintah desa terkait pembuangan sampah yang harusnya dilakukan di sisi timur dan pelaksanaan pemilahan sampah dari sumbernya. Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sudah berjalan dengan baik, namun terdapat perbedaan dalam komitmen dan kompetensi masyarakat yang bervariasi. Beberapa masyarakat telah memiliki kesadaran yang dapat dilihat dari tanggung jawabnya dalam memilah sampah dari sumbernya dengan melalui partisipasi dalam program bank sampah, tetapi masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Keberlanjutan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat masih terus berlanjut dan melalui pembangunan TPS 3R yang akan segera dilaksanakan, maka diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan sampah di Desa Gombang. Faktor penghambat utama sinergitas ialah adanya dominasi peran pemerintah desa, yang bisa mengurangi partisipasi masyarakat lainnya. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, serta menciptakan kesetaraan dalam peran antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dale, J. O. (1981). Culture and Synergy: Tools for Educational and Social Reconstruction. *Journal of Thought*, 16(3), 119–129.

detikJateng. (2024, June 21). *Produksi Sampah Boyolali 300 Ton Per Hari, Hanya Sepertiga yang Bisa Ditampung*. DetikJateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7401735/produksi-sampah-boyolali-300-ton-per-hari-hanya-sepertiga-yang-bisa-ditampung>

- Geller, E. S., & Geller, K. S. (2020). PSYCHOLOGICAL SCIENCE FOR SAFETY SUCCESS, PART 5: Achieve Synergy With Diversity, Trust & Interdependence. *Professional Safety*, 65(2), 25–27.
- Handayaningrat, S. (1989). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. CV Haji Masagung.
- Harits, B. (2020). PENGARUH KOORDINASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMUNGUT PBB PADA KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 10–21. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2895>
- Hasan, E. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Aditama.
- Littlejohn, S. W. (2005). *Theories of Human Communication*. Thomson.
- Najiyati, S., & Susilo, S. R. T. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Goverment Institutions in The Transmigration Urban Development). *Jurnal Ketransmigrasian*, 28(2), 113–124.
- Pemerintah Kabupaten Boyolali. (n.d.). Retrieved May 18, 2025, from <https://boyolali.go.id/news/strategi-dlh-boyolali-kelola-sampah-mulai-dari-sumbernya>
- Prihartono, D., M. Qudrat Nugraha, Khaerul Umam Noer, & Izzatusholekha. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI KECAMATAN JAGAKARSA. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(01), 124–135. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.22320>
- Roring, H. N., Tulusan, F. M. G., & Kolondam, H. F. (2023). Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Sampah di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 44–51.
- Satibi, I., Ediyanto, E., & Vaugan, R. (2023). KONSTRUKSI KONSEP SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 33–46. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>
- Silalahi, U. (2011). *Asas-asas Manajemen*. Refika Aditama.
- SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (n.d.). Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Retrieved April 9, 2025, from <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Wang, W., Chu, Z., & Zhang, T. (2022). Synergy Degree Evaluation of Stakeholder Engagement in Integrated Municipal Solid Waste Management: A Case Study in Harbin, China. *Energies*, 1–18.